

PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS EKSPOR DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ary Sutrischastini

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta
E-mail: arisutrischastini@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to identify economic sectors that are relatively potential and play a role as a base sector, determine the magnitude of the multiplier of base sector activities on regional income in Gunungkidul Regency and determine the amount of regional revenue leakage that occurs as a result of base activities. The analytical method uses the export base method with the time period of 2013 - 2019. The results is there are ten (10) sectors which are categorized as the base sector in Gunungkidul Regency because they have a Location Quotient (LQ) value that greater than one. The multiplier average value of base sector activities to regional income is 1.49. This means that changes in economic activity in the base sector by one (1) percent will cause changes in economic activity in the non-base sector by 0.49 percent. The amount of regional revenue leakage that occurred as a result of base activities in Gunungkidul Regency was an average of 1.90 percent. This means that 98.10 percent of income remains in Gunungkidul Regency and the rest 1.90 percent of income is outside.

Keywords: export base model, base sector, non base sector

JEL Classification: P25, R12

PENDAHULUAN

Model basis ekspor merupakan salah satu model pengembangan wilayah. Model ini menekankan pada aktivitas perekonomian daerah yang bersifat terbuka terhadap kegiatan perdagangan barang dan jasa dengan daerah lain. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh pertumbuhan ekspornya (Tambunan, 2015). Suatu kegiatan dikatakan sebagai basis apabila pertumbuhan kegiatan tersebut menentukan pembangunan secara menyeluruh, sedangkan dikategorikan non basis apabila kegiatan itu merupakan konsekuensi dari pembangunan menyeluruh tersebut. Cakupan non basis antara lain sektor yang melayani pasar lokal dan menyediakan input bagi sektor basis (Soepono, 2001).

Pembangunan ekonomi harus dilakukan dengan didasarkan pada potensi kelembagaan, sumber daya manusia dan sumberdaya fisik yang dimiliki secara lokal (Arsyad, 2002). Nugrohadhi *et al.* (2015) menambahkan permintaan eksternal terhadap barang yang dihasilkan juga harus menjadi bahan pertimbangan dalam dalam pengambilan kebijakan, agar dapat ditentukan sektor basis.

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kabupaten ini pada tahun 2015 memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 5,82 persen sebagai tingkat pertumbu-

han tertinggi dibanding kabupaten/kota lain di DIY. Hal ini akan lebih jelas ditunjukkan pada Tabel 1. Apabila dilihat secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota DIY dari tahun 2015 - 2019 memiliki kecenderungan meningkat, kecuali Kabupaten Gunungkidul yang mengalami penurunan. Bahkan

tahun 2019, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan angka terendah (5,33 persen) dibanding kabupaten/kota lain di Propinsi DIY. Oleh karena itu, penelitian ini memilih Kabupaten Gunungkidul.

Tabel 1
Pertumbuhan Ekonomi per Kabupaten/Kota di DIY, Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Bantul	4,97	5,05	5,1	5,47	5,53
Sleman	5,18	5,22	5,34	6,42	6,49
Gunungkidul	5,82	4,88	5,01	5,16	5,33
Kulon Progo	4,62	4,76	5,97	10,84	13,49
Kota	5,09	5,11	5,24	5,49	5,96
DIY	4,95	5,05	5,26	6,2	6,6

Sumber: BPS, 2020

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang relatif berpotensi dan berperan menjadi sektor basis untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, menentukan besarnya multiplier dari kegiatan sektor basis terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Gunungkidul dan menentukan besarnya kebocoran pendapatan daerah yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan basis.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Pendekatan basis ekspor adalah suatu pendekatan yang menekankan peranan ekspor dalam pembangunan daerah, karena ekspor memberi kontribusi langsung berupa peningkatan pendapatan faktor-faktor produksi dan pendapatan daerah dan menciptakan permintaan terhadap produksi industri lokal yaitu industri yang produknya dipakai untuk melayani pasar di daerah (Arsyad, 2002). Williamson (1975) menambahkan akan pentingnya perdagangan ke luar daerah karena permintaan lokal sangat dibatasi oleh jumlah dan tingginya pendapatan masyarakat daerah tersebut. Dengan meningkatkan teknik dan jumlah barang yang

dihasilkan, maka daya saing dan keuntungan langsung dapat diperoleh daerah.

Dalam teori basis ekspor lebih menekankan pada permintaan dari luar daerah. Kegiatan ekspor yang meningkat, akan diikuti oleh peningkatan pendapatan daerah dan nasional, tetapi teori ini gagal menjelaskan mengapa industri berada di tempat pertama. Sedangkan faktor yang lain seperti meningkatnya penawaran tenaga kerja, perbaikan transportasi, penemuan sumber daya baru dan lain-lain sebagai penyebab mendasar ekspansi tersebut terabaikan (Lewis, 1972).

Asumsi teori ini adalah ekspor merupakan satu-satunya unsur eksogen dalam pengeluaran. Artinya, secara tidak langsung hanya ekspor yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan sektor yang lain bersifat terikat atau tergantung peningkatannya dari peningkatan pendapatan daerah. Asumsi kedua adalah fungsi pengeluaran dan fungsi impor bertolak dari titik nol, sehingga tidak akan berpotongan (Matitaputty, 2015).

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian negara menuju keadaan yang lebih baik dan terjadi secara berkesinambungan selama periode tertentu (Putra,

2018). Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi meliputi: sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan modal.

Location Quotient (LQ) adalah suatu teknik yang umum digunakan untuk menentukan kapasitas ekspor perekonomian daerah dan derajat *self-sufficiency* suatu sektor (Chiang, 2008). LQ juga menunjukkan besarnya konsentrasi industri di daerah studi, dengan besarnya konsentrasi industri di daerah yang menjadi *benchmark* (Nurzaman, 2008). Dasar pemikiran teknik ini adalah sektor basis akan menghasilkan barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun di luar daerah. Penjualan keluar daerah akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut dan menciptakan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan permintaan terhadap sektor basis dan non basis. Kenaikan permintaan ini akan meningkatkan investasi pada industri yang bersangkutan, sehingga investasi modal dalam sektor non basis merupakan investasi yang didorong sebagai akibat dari kenaikan industri basis.

Dengan diketahui suatu sektor termasuk basis atau non basis, maka dapat diketahui juga efek penggandanya. Angka pengganda adalah angka yang menunjukkan banyaknya tenaga kerja atau produk domestik regional bruto yang terbentuk karena kegiatan ekonomi di sektor basis. Lewis (1976) mengatakan bahwa dengan berkembangnya sektor basis, maka akan memberikan efek pengganda pada pendapatan dan kesempatan kerja di daerah tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gunungkidul dengan kurun waktu tahun 2013-2019. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), berupa data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY dan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga konstan 2010 dari tahun 2013-2019. Dalam menganalisis sektor basis digunakan metode LQ (*Location Quotient*):

$$\frac{(E_{ij}/E_j)}{(E_{in}/E_n)} = LQ$$

Keterangan:

LQ = Koefisien *Location Quotient*

E_{ij} = Variabel regional disektor i di wilayah j

E_j = Variabel regional di wilayah j

E_{in} = Variabel regional di sektor i di wilayah nasional

E_n = Variabel regional di perekonomian nasional

Apabila LQ=1, berarti semua permintaan akan output dipenuhi oleh sektor tersebut di daerah. Apabila LQ>1, berarti sektor i mampu melakukan ekspor sehingga disebut sektor basis. Apabila LQ<1, berarti daerah tersebut kekurangan produk yang dihasilkan oleh sektor i dan harus mendatangkan atau mengimpor produk itu apabila pola konsumsi di daerah itu ingin dipertahankan, maka sektor ini disebut sektor non basis (Soepono, 2001). Untuk menghitung nilai multiplier digunakan *multiplier export base*, dengan rumus:

$$\frac{1}{(1-a)} = K \text{ (Soepono, 2001)}$$

Keterangan:

a = S/T= Nilai perbandingan antara kegiatan sektor non basis (S) dengan ekonomi total (T) dan K = Multiplier.

Untuk menentukan besarnya kebocoran pendapatan daerah yang terjadi sebagai akibat dari sektor basis, digunakan rumus: (Arsyad, 2002)

$$L = 100 - ((1 - LQ/100) \times 100)$$

Keterangan:

L = Besarnya kebocoran; LQ = Koefisien *Location Quotient* (LQ) dan 100 = konstanta

HASIL PENELITIAN

Untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang relative berpotensi dan berperan menjadi sektor basis untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Gunungkidul, maka dilakukan dengan menghitung nilai LQ. Berdasar hasil perhitungan LQ di Kabupaten Gunungkidul untuk periode tahun 2013 - 2019 terdapat 10 sektor yang termasuk sektor basis karena kesepuluh sektor tersebut memiliki nilai LQ > 1, sedang yang non basis ada 7 sektor dengan nilai LQ < 1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Nilai Location Quotient (LQ) di Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2013-2019

Sektor	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	RERATA
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.86	1.78	1.76	1.74	1.71	1,68	1,64	1,74
B. Pertambangan dan Penggalian	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0,18	0,18	0,17
C. Industri Pengolahan	0.44	0.44	0.43	0.44	0.45	0,45	0,46	0,44
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.09	0.09	0.09	0.10	0.11	0,1	0,1	0,1
E. Pengadaan air, pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.06	2.04	1.96	1.93	1.92	1,9	1,97	1,97
F. Konstruksi	0.98	0.97	0.95	0.95	0.96	0,98	0,99	0,97
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.65	0.66	0.69	0.71	0.73	0,73	0,73	0,7
H. Transportasi dan Pergudangan	1.44	1.38	1.35	1.30	1.24	1,21	1,2	1,3
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.81	1.86	1.90	1.91	1.91	1,92	1,95	1,9
J. Informasi dan Komunikasi	2.04	2.02	1.93	1.96	2.44	1,89	1,87	2,02
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0.52	0.56	0.56	0.54	0.51	0,53	0,54	0,54
L. Real Estate	1.12	1.15	1.19	1.21	1.23	1,3	1,28	1,21
M, N. Jasa Perusahaan	0.32	0.31	0.31	0.30	0.30	0,29	0,28	0,3
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.46	2.55	2.57	2.62	2.69	2,62	2,45	2,22
P. Jasa Pendidikan	2.05	2.11	2.12	2.11	2.17	2,16	2,16	2,13
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.97	1.97	1.98	1.97	1.96	1,93	1,88	1,95

Sumber: Data diolah

Tabel 3 menunjukkan hasil penghitungan multiplier, perubahan kegiatan sektor basis dan non basis. Kabupaten Gunungkidul untuk periode tahun 2013 – 2019 memiliki rata-rata multiplier sebesar 1,49. Multiplier tertinggi dicapai pada tahun 2016 dan 2018 yaitu sebesar 1,52. Sedangkan tahun 2013, 2014 dan 2015 memiliki nilai multiplier masing-masing sebesar 1,47. Hasil perhitungan kebocoran pendapatan daerah di kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada Tabel 4. Secara keseluruhan kebocoran pendapatan daerah di Kabupaten Gunungkidul untuk periode tahun 2013-2019 rata-rata sebesar 1,90 persen. Sektor administrasi

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib memiliki nilai kebocoran pendapatan yang paling tinggi dengan rata-rata sebesar 2,57 persen. Sedangkan rata-rata nilai kebocoran pendapatan yang terendah yaitu sektor *real estate* sebesar 1,21 persen.

Secara rata-rata besarnya persentase pendapatan yang tetap berada di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 98,09 persen. Pada tahun 2015 dan 2016 pendapatan yang tetap berada di Kabupaten Gunungkidul naik menjadi sebesar 98,10 persen dan tahun 2019 menurun menjadi 97,81 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 3
Besarnya Multiplier, Perubahan Kegiatan Sektor Basis, dan Perubahan Sektor Non Basis Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2013-2019

Tahun	Multiplier	Perubahan Sektor Basis	Perubahan Sektor Non Basis
2013	1,47	1	0,47
2014	1,47	1	0,47
2015	1,47	1	0,47
2016	1,52	1	0,52
2017	1,49	1	0,49
2018	1,52	1	0,52
2019	1,49	1	0,49
Rerata	1,49	1	0,49

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 4
Persentase Kebocoran Pendapatan di Kabupaten Gunungkidul, Tahun 2013 – 2019

No	Sektor	Tahun							Rerata
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	1,86	1,78	1,76	1,74	1,71	1,68	1,64	1,74
2	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	2,06	2,04	1,96	1,93	1,92	1,9	1,97	1,97
3	Transportasi dan pergudangan	1,44	1,36	1,35	1,3	1,24	1,21	1,2	1,3
4	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,81	1,86	1,9	1,91	1,91	1,92	1,95	1,89
5	Informasi dan komunikasi	2,04	2,02	1,93	1,96	2,44	1,89	1,87	2,02
6	Real Estate	1,12	1,15	1,19	1,21	1,23	1,3	1,28	1,21
7	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	2,46	2,55	2,57	2,62	2,69	2,62	2,45	2,57
8	Jasa Pendidikan	2,05	2,11	2,12	2,11	2,17	2,16	2,16	2,13
9	Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	1,97	1,97	1,98	1,97	1,96	1,93	1,88	1,95
10	Jasa Lainnya	2,26	2,22	2,23	2,22	2,18	2,13	2,06	2,19
	Rerata	1,91	1,91	1,9	1,9	1,95	1,87	1,85	1,9

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 5
Persentase Pendapatan yang Tetap Berada di Kabupaten Gunungkidul,
Tahun 2013-2019

No	Sektor	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	98,14	98,22	98,24	98,26	98,29	98,32	98,36
2	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	97,94	97,96	98,04	98,07	98,08	98,1	98,03
3	Transportasi dan pergudangan	98,56	98,62	98,65	98,7	98,76	98,79	98,8
4	Penyediaan akomodasi dan makan minum	98,19	96,14	98,1	96,09	96,09	98,08	98,05
5	Informasi dan komunikasi	97,96	97,98	98,07	98,04	97,56	98,11	98,13
6	<i>Real Estate</i>	98,88	98,85	98,81	98,79	98,77	98,7	98,72
7	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	97,54	97,45	97,43	97,38	97,31	97,38	97,55
8	Jasa Pendidikan	97,95	97,89	97,88	97,89	97,83	97,84	97,84
9	Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	98,03	96,03	98,02	98,03	98,04	98,07	98,12
10	Jasa Lainnya	97,64	97,78	97,77	97,78	98,82	97,87	97,94
	Rerata	98,09	98,09	98,1	98,1	98,05	98,13	97,81

Sumber: Data diolah, 2020

PEMBAHASAN

Kabupaten Gunungkidul memiliki sektor basis yang cukup banyak karena dari 17 sektor terdapat 10 sektor yang dikategorikan sektor basis. Adapun kesepuluh sektor tersebut meliputi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor real estate; sektor administrasi, pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa Pendidikan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan sektor jasa lainnya. Berdasar kesepuluh sektor tersebut yang memiliki nilai LQ tertinggi adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan nilai LQ sebesar 2,22. Berarti sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib memiliki peran yang paling besar dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Kabupaten Gunungkidul. Kemudian diikuti oleh sektor jasa lainnya yang memiliki nilai LQ sebesar 2,19 dan

sektor Pendidikan sebesar 2,13. Sektor-sektor yang dikategorikan sebagai sektor basis, pertumbuhannya dapat menimbulkan atau menentukan pembangunan secara menyeluruh di wilayah tersebut. Sedangkan aktivitas dari sektor non basis merupakan konsekuensi pembangunan yang ditimbulkannya.

Multiplier adalah sebuah ratio yang jumlahnya tidak tentu, dan multiplier mengacu pada sebuah pekerjaan atau pendapatan yang didukung oleh kegiatan sektor basis. Salah satu manfaat menghitung multiplier adalah untuk menganalisis perubahan sektor basis, sektor non basis dan perubahan terhadap sektor ekonomi secara total. Pada Tabel 3 menunjukkan besarnya multiplier di Kabupaten Gunungkidul untuk periode 2013 – 2019 dengan rata-rata multiplier sebesar 1,49. Artinya bahwa perubahan atau peningkatan kegiatan ekonomi di sektor basis sebesar satu (1) persen akan menyebabkan perubahan atau peningkatan kegiatan ekonomi di sektor non basis sebesar 0,49 persen. Pada tahun 2016 dan 2018 memiliki nilai multiplier sebesar 1,52. Ini berarti apabila sektor basis mengalami perubahan atau peningkatan sebesar 1 persen, maka

akan mendorong tumbuhnya sektor ekonomi non basis sebesar 0,52 persen. Selama tujuh tahun periode pengamatan kedua tahun tersebut memiliki multiplier yang paling tinggi dibanding dengan tahun yang lain. Sektor administrasi, pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang tetap memberi kontribusi terbesar karena memiliki nilai LQ yang terbesar pula.

Apabila dilihat dari nilai rata-rata tertinggi besarnya kebocoran pendapatan daerah yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan basis di Kabupaten Gunungkidul untuk periode 2013 - 2019, maka sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib memiliki nilai kebocoran yang tertinggi yaitu sebesar 2,57 persen. Artinya bahwa sebesar 97,43 persen pendapatan yang tetap berada di Kabupaten Gunungkidul dan 2,57 persen pendapatan berada di luar Kabupaten Gunungkidul. Sektor ini tingkat kebocorannya cenderung fluktuatif meningkat dari tahun 2013 sampai dengan 2017, tapi pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan dari 2,69 tahun 2017 menjadi 2,62 pada tahun 2018 dan turun lagi menjadi 2,45 pada tahun 2019. Persentase tingkat kebocoran pendapatan menunjukkan kemampuan sektor basis dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam wilayah sendiri maupun di luar wilayah yang dianalisis. Jika nilai kebocoran semakin tinggi, maka kemampuan sektor basis tersebut dalam memenuhi kebutuhan wilayah sendiri maupun di luar wilayah tersebut semakin tinggi pula. Demikian sebaliknya, jika nilai kebocoran semakin rendah, maka kemampuan sektor basis dalam memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan di luar wilayah tersebut akan semakin rendah.

Persentase tingkat kebocoran pendapatan memiliki keterkaitan dengan pendapatan yang tetap berada di wilayah sendiri. Di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2013 persentase tertinggi pendapatan yang tetap berada di Kabupaten Gunungkidul ditempati oleh sektor *real estate*. Tapi pada tahun 2019 sektor transportasi dan pergudangan yang menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 98,80 persen. Sektor *real estate* mengalami penurunan dari 98,88 persen pada tahun 2013 menjadi 98,72 persen pada tahun 2019. Dengan turunnya pendapatan yang tetap berada di wilayah sendiri berarti kemampuan meningkatkan pendapatan di luar wilayah semakin tinggi. Artinya, kemampuan ekspornya semakin tinggi. Kemudian sektor transportasi dan pergudangan yaitu sebesar 98,56 persen pada

tahun 2013 dan meningkat pada tahun 2019 yaitu sebesar 98,80 persen. Berarti dengan naiknya pendapatan yang tetap di wilayah sendiri, maka kemampuan sektor tersebut dalam mengekspor ke luar wilayah semakin menurun.

Dengan diperolehnya nilai LQ ini sangat penting dalam menentukan suatu sektor kategori basis atau non basis. Dengan lebih memfokuskan pada sektor basis diharapkan pertumbuhan dan pembangunan suatu wilayah akan meningkat dengan pesat, karena naiknya nilai LQ akan mendorong nilai multiplier juga meningkat. Meningkatnya nilai multiplier berarti bila terjadi perubahan atau peningkatan di sektor tersebut, maka kegiatan ekonomi di sektor non basis akan meningkat pula.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kabupaten Gunungkidul dalam periode 2013-2019 memiliki sepuluh sektor yang dikategorikan sebagai sektor basis, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor real estate; sektor administrasi, pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa Pendidikan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan sektor jasa lainnya. Secara rata-rata nilai multiplier sebesar 1,49. Berarti perubahan kegiatan ekonomi di sektor basis sebesar satu persen, menyebabkan perubahan kegiatan ekonomi di sektor non basis sebesar 0,49 persen. Rata-rata kebocoran pendapatan daerah yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan basis sebesar 1,90 persen. Berarti bahwa 98,10 persen pendapatan yang tetap berada di Kabupaten Gunungkidul dan 1,90 persen pendapatan yang berada di luar Kabupaten Gunungkidul.

Saran

Sektor-sektor yang diklasifikasikan sebagai sektor basis hendaknya dipertahankan dan terus mendapat perhatian dari pemerintah karena sektor ini sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Sektor real estate memiliki nilai persentase kebocoran

pendapatan paling rendah yaitu sebesar 1,21. Sektor ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, karena Kabupaten Gunungkidul terkenal dengan daya tarik wisatanya. Jika sektor ini dikembangkan, akan mendorong pertumbuhan daerah lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 2002. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- BPS. 2020. Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2019. <https://bantulkab.bps.go.id/dynamicstable/2020/02/28/120/laju-pertumbuhan-pdrb-seri-2010-menurut-lapangan-usaha-juta-rupiah-tahun-2011-2019.html>. Diakses 30 April 2020.
- BPS. 2020. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2011-2019. <https://kulonprogokab.bps.go.id/dynamicstable/2018/07/10/187/laju-pertumbuhan-pdrb-kabupaten-kulon-progo-atas-dasar-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha-2011-2019.html>. Diakses 30 April 2020.
- BPS. 2020. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gunungkidul Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2019 (Persen). <https://Gunungkidulkab.bps.go.id/dynamicstable/2020/02/28/47/laju-pertumbuhan-pdrb-kabupaten-Gunungkidul-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha-tahun-2011-2019-persen-.html>. Diakses 30 April 2020.
- BPS. 2020. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2019 (Persen). <https://slemankab.bps.go.id/dynamicstable/2017/07/05/5/laju-pertumbuhan-pdrb-kabupaten-sleman-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha-tahun-2011-2016-persen-.html>. Diakses 30 April 2020.
- BPS. 2020. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, 2011-2019. <https://jogjakota.bps.go.id/dynamicstable/2020/04/07/64/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdrb-kota-yogyakarta-atas-dasar-harga-konstan-menurut-pengeluaran-2011-2019.html>. Diakses 30 April 2020.
- BPS. 2020. Laju Pertumbuhan Y on Y PDRB D.I. Yogyakarta ADHK Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2010-2020. <https://yogyakarta.bps.go.id/dynamicstable/2020/02/06/168/-seri-2010-laju-pertumbuhan-y-on-y-pdrb-d-i-yogyakarta-adhk-menurut-lapangan-usaha-persen-2010-2020.html>. Diakses 30 April 2020.
- Chiang, S. 2008. Location Quotient and Trade. *The Annals of Regional Science*. <https://scihub.wikicn.top/10.1007/s00168-008-0218-y>. Diakses 30 April 2020.
- Lewis, William Cris. 1972. A Critical Examination of The Export-Base Theory of Urban- Regional Growth. *The Annals of Regional Science*. <https://scihub.wikicn.top/https://doi.org/10.1007/BF01283888>. Diakses 15 April 2020.
- Lewis, William Cris. 1976. Export Base Theory And Multiplier Estimation: A Critique. *The Annals of Regional Science*. <https://scihub.wikicn.top/10.1007/bf01303243>. Diakses 15 April 2020.
- Matitaputty, Shandy Jannifer. 2015. Teori Pertumbuhan Basis Ekspor: Penerapannya Untuk Pertumbuhan Regional Di Kabupaten Jepara. <http://jurnal.fe.uad.ac.id/wp-content/uploads/2015-09-feuad-rev-134-146.pdf>. Diakses 14 April 2020.
- Nugrohadhi, I.A. Wirawan, Abrista Devi, dan Aam Slamet Rusydiana. 2015. Analisis Tinjauan Dan Posisi Daya Saing Perikanan Kabupaten Natuna Melalui Pendekatan LQ (Location Quotient),

SSA (Shift Share Analysis) dan RCA (Revealed Comparative Advantage). *Jurnal Administrasi dan Manajemen* <http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/administrasimanajemen/article/view/170>. Diakses 15 April 2020.

Nurzaman, Siti Sutriah. 2008. Teori Basis Ekspor Masa Kini di Arab Saudi. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. file:///C:/Users/hp/Downloads/4200-14502-1-SM.pdf. Diakses 15 April 2020.

Putra, Windu. 2018. *Perekonomian Indonesia Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Soepono, Prasetyo. 2001. Teori Pertumbuhan Berbasis Ekonomi (Ekspor): Posisi dan Sumbangannya Bagi Perbendaharaan Alat-alat Analisis Regional. *Journal of Indonesian Economy and Business*. <https://jurnal.ugm.ac.id/jieb/article/view/6802>. Diakses 15 April 2020.

Tambunan, Tulus. 2015. *Perekonomian Indonesia Era Orde Lama Hingga Jokowi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Williamson, Robert W. 1975. Predictive Power of The Export Base Theory. <https://scihub.wikicn.top/10.1111/j.1468-2257.1975.tb00774.x>. Diakses 15 April 2020.